



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**



# **PEDOMAN WILAYAH BINAAN**

**POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG**

# **2020**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG**



- Kampus Pusat : Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, 65112 Telp (0341) 566075, 571388 Fax (0341) 556746
- Kampus I : Jl. Srikoyo No. 106 Jember Telp (0331) 486613
- Kampus II : Jl. A. Yani Sumberporong Lawang Telp (0341) 427847
- Kampus III : Jl. Dr. Soetomo No. 46 Blitar Telp (0342) 801043
- Kampus IV : Jl. KH Wakhid Hasyim No. 64B Kediri Telp (0354) 773095
- Kampus V : Jl. Dr. Soetomo No. 5 Trenggalek Telp (0355) 791293
- Kampus VI : Jl. Dr. Cipto Mangunkusomo No. 82A Ponorogo Telp (0352) 461792

Website : [Http://www.poltekkes-malang.ac.id](http://www.poltekkes-malang.ac.id) Email : [direktorat@poltekkes-malang.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-malang.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG

NOMOR HK.02.03/1.5/6376/2020

TENTANG

PEDOMAN WILAYAH BINAAN BAGI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat;
- b. bahwa kegiatan wilayah binaan yang merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh para Dosen sebagai tenaga fungsional di Perguruan Tinggi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang tentang Pedoman Wilayah binaan Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang.
- Mengingat : 1. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 44 tahun 2015, bab IV Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
2. UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bagian Keduabelas, Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 48 ayat 1 : Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 220 /menkes/SK/VI/2013 tentang tim binaan wilayah bidang kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG TENTANG PEDOMAN WILAYAH BINAAN BAGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG

KESATU : Pedoman sebagaimana dimaksud berlaku untuk seluruh Jurusan yang berada di Poltekkes Kemenkes Malang.

KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan bagi Poltekkes Kemenkes Malang dalam pelaksanaan kegiatan wilayah binaan

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Poltekkes Kemenkes Malang dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

pada tanggal : 7 Oktober 2020

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES  
MALANG



BUDI SUSATIA, SKp.M.Kes

**PENGARAH:**

Budi Susatia, S.Kp, M.Kes  
Dr. Moh. Wlidan, A.Per.Pen.,M.Pd  
Bernadus Rudy Sunindya, MPH  
Dr. Ganif Djuwadi, S.ST, S.Pd, M.Kes

**TIM PENYUSUN:**

Sri Winarni, S.Pd, M.Kes  
Dr. Jenny Sophia Sondakh  
Sri Handayaningsih, S.Pd

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga Pedoman Wilayah Binaan bagi Poltekkes Kemenkes Malang ini telah dapat diterbitkan. Pedoman ini dimaksudkan untuk memandu pelaksanaan kegiatan wilayah binaan bagi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Malang

Buku pedoman wilayah binaan ini memuat definisi, tujuan serta sasaran serta langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan wilayah binaan, meskipun belum sepenuhnya sempurna, pedoman Wilayah Binaan Bagi Poltekkes Kemenkes Malang ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan tiap tahun dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami menerima saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami berharap semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat untuk pendidikan tenaga kesehatan dan masyarakat.

Malang, 7 Oktober 2020

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES  
MALANG



BUDI SUSATIA, SKp.M.Kes

## DAFTAR ISI

SK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
I     Pendahuluan.....	1
II    Dasar .....	1
III   Tujuan.....	1
IV    Sasaran .....	2
V     Orientasi Program Pembinaan Wilayah Berkelanjutan .....	2
VI    Kegiatan Program Wilayah Binaan .....	2
VII   Waktu Pelaksanaan.....	2
VIII  Langkah-langkah Pelaksanaan Wilayah Binaan.....	3
IX    Diskripsi Proposal.....	3
X     Penutup .....	6

## DAFTAR LAMPIRAN

lampiran I. Format Proposal .....	7
-----------------------------------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang sebagai salah satu perguruan tinggi kesehatan mempunyai potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia (SDM) untuk ikut berperan dalam pembangunan wilayah binaan bidang kesehatan. Salah satu peran yang dilakukan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang adalah memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu menuntun masyarakat wilayah binaan kearah kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera, dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan tentang kesehatan.

Program Pengembangan Wilayah Binaan dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat luas dapat berupa kelompok masyarakat, komunitas, maupun lembaga yang berada di desa/kelurahan serta dunia usaha dan dunia industri.

Program wilayah binaan pada masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun lembaga dengan civitas akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat/kelompok/komunitas serta mempertimbangkan kearifan lokal.

### **II. DASAR**

1. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 44 tahun 2015, bab IV Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
2. UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bagian Keduabelas, Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 48 ayat 1 : Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 220 /menkes/SK/ VI/2013 tentang tim binaan wilayah bidang kesehatan

### **III. TUJUAN**

Adapun tujuan dalam pelaksanaan wilayah binaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang adalah sebagai berikut :

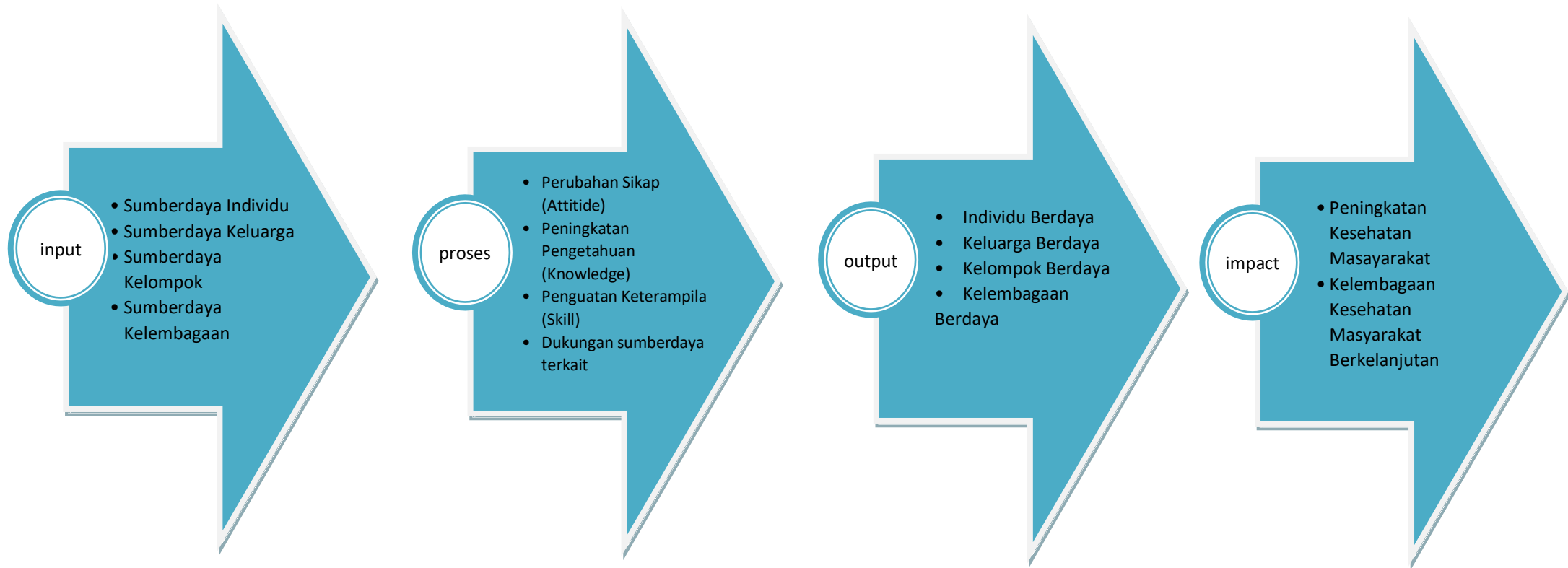
1. Mempermudah civitas akademik dalam melaksanakan pembinaan wilayah melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Sebagai acuan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada pada masyarakat agar mampu mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri.
1. Terbentuknya model wilayah binaan yang mandiri dalam program kesehatan dan kesejahteraan.



#### **IV. SASARAN**

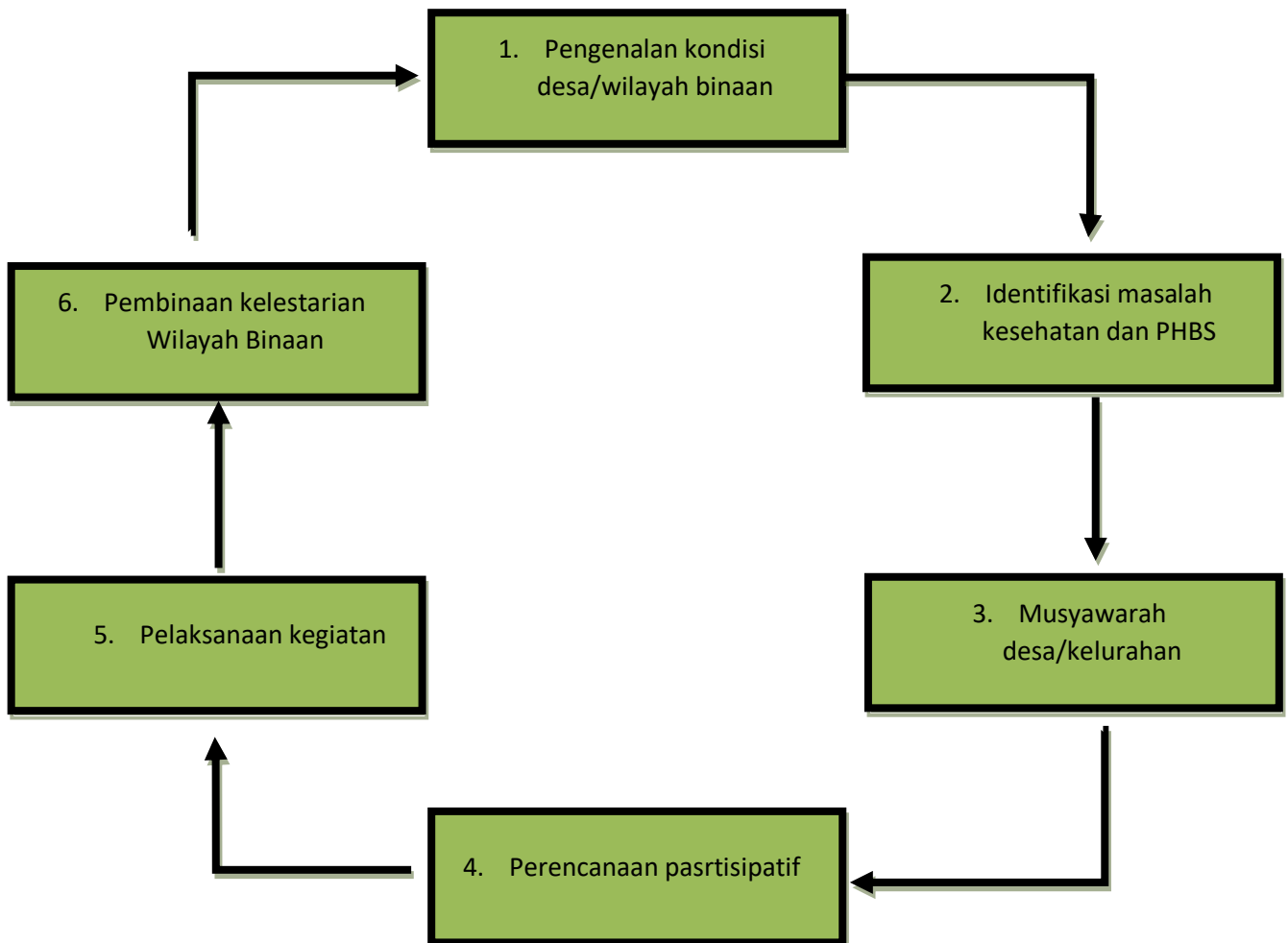
1. Terwujudnya kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Malang, dan kawasan binaannya;
2. Terwujudnya kemitraan dengan dunia usaha, institusi pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat umum;
3. Meningkatnya budaya kepedulian terhadap masyarakat di kalangan sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Malang.

## BAB II ROADMAP WILYAH BINAAN



BAB III  
PENGELOLAAN WILAYAH BINAAN

- I. Proses Pengembangan Wilayah Binaan Poltekkes Kemenkes Malang  
Langkah-langkah kegiatan pengembangan wilayah binaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang digambarkan sebagai berikut :



1. Pengenalan Kondisi Desa/Kelurahan  
Pengenalan kondisi Desa atau Kelurahan melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), lembaga kemasyarakatan, dan Perangkat Desa/Kelurahan dan dilakukan hasil analisis situasi perkembangan Desa dan Kelurahan, yang sudah dapat atau belum dapat dipenuhi oleh Desa atau Kelurahan yang bersangkutan
2. Identifikasi masalah Kesehatan dan PHBS  
Dengan mengkaji Profil/Monografi Desa/Kelurahan, dan hasil analisis situasi kesehatan melalui Survei Mawas Diri (SMD). SMD merupakan pengumpulan data oleh kader, tokoh masyarakat, anggota Forum Desa yang terlatih dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disepakati Forum Desa. Melalui SMD, dapat diidentifikasi:
  - Masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat dan prioritas penanganannya.
  - Penyebab masalah kesehatan dan perilaku masyarakat.
  - Potensi yang dimiliki desa/kelurahan

- UKBM yang ada dan harus diaktifkan kembali/dibentuk baru.
  - Bantuan/dukungan yang diharapkan: apa bentuknya, berapa banyak, dari mana kemungkinan didapat (sumber), dan bilamana dibutuhkan
3. Musyawarah Desa/Kelurahan
- a. Musyawarah Desa/Kelurahan dapat dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dulu menyelenggarakan Musyawarah Dusun atau Rukun Warga. Musyawarah Desa diselenggarakan dengan menyajikan hasil analisis data hasil kajian Profil Desa/Kelurahan dan atau hasil SMD.
  - b. Musyawarah Desa/Kelurahan bertujuan:
    - Menyosialisasikan masalah kesehatan yang dihadapi.
    - Mencapai kesepakatan urutan prioritas.
    - Mencapai kesepakatan tentang UKBM yang dibentuk baru atau diaktifkan kembali.
    - Memantapkan data potensi desa untuk sumber bantuan/dukungan yang diperlukan.
    - Menggalang semangat dan partisipasi warga untuk mendukung pengembangan
  - b. Setelah diperoleh kesepakatan dari warga, Lembaga dan lembaga kemasyarakatan mengadakan pertemuan guna menyusun rencana pengembangan Desa dan MoU kerjasama.
4. Perencanaan Partisipatif
- UKBM yang akan dibentuk baru atau diaktifkan kembali.
  - Sarana yang akan dibangun baru atau direhabilitasi (misalnya Poskesdes, Polindes, sarana air bersih, jamban keluarga, dll).
  - Kegiatan yang akan dilaksanakan dan biaya operasionalnya.
5. Pelaksanaan Kegiatan
- a. Kegiatan yang mendapat dukungan dana dari BOPTN memerlukan proses pengembangan desa binaan.
  - b. Kegiatan dapat dimulai dengan membentuk UKBM-UKBM, menetapkan kader-kader pelaksanaannya.
  - c. Pelaksanaan kegiatan yang tidak memerlukan biaya operasional seperti promosi kesehatan melalui Dasawisma, pertemuan Rukun Tetangga, pertemuan Rukun Warga/ Dusun, atau forum-forum kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.
  - d. Tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab mengenai realisasi fisik, keuangan, dan administrasi kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan rencana
  - e. Apabila dibutuhkan barang berupa bahan dan alat yang tidak dapat disediakan/dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dapat membantu masyarakat untuk menyediakan barang/jasa tersebut.
  - f. Pencatatan dan pelaporan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemendagri.
  - g. Pelatihan teknis, termasuk kursus-kursus penyegaran, bagi para kader pelaksana UKBM menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakannya, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dibuat oleh Kemendagri dan Kemenkes.
  - h. Pembinaan kelestarian Desa/Kelurahan Siaga Aktif tugas dari KPM, Kepala Desa/Lurah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
  - i. Pertemuan berkala dan kursus penyegaran bagi para kader, termasuk KPM, juga dikembangkan cara lain melalui program Kelompokcapir dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

## **II. ORIENTASI PROGRAM PEMBINAAN WILAYAH BERKELANJUTAN**

Pengembangan pembinaan wilayah berkelanjutan senantiasa berorientasi pada kaidah berikut ini:

- a. Dikelola melalui pengorganisasian yang dapat melibatkan sebanyak mungkin unsur dan institusi.
- b. Berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Berorientasi pada prinsip kemitraan dengan stakeholders.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat wilayah binaan untuk pengembangan potensi dan aset setempat untuk kesejahteraan bersama.
- e. Pelaksanaan kegiatan mencakup kegiatan kepedulian sosial, pendampingan masyarakat melalui edukasi/konsultasi, penjaminan mutu, perintisan dan peningkatan produktivitas masyarakat
- f. Menjadi lembaga yang memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat.
- g. Program disusun melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut.

### **III. KEGIATAN PROGRAM WILAYAH BINAAN**

1. Mempelajari program –program kesehatan yang sedang dijalankan oleh wilayah, terutama yang berkaitan dengan Program Kesehatan
2. Menetapkan sasaran komunitas yang akan dibina
3. Melaksanakan pengumpulan data kesehatan, menganalisa data, merumuskan masalah dan memprioritaskan masalah bersama mitra
4. Menyusun rencana pemecahan masalah (*Plan Of Action*) berdasarkan masalah komunitas
5. Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan musyawarah dalam mengenali masalah kesehatan serta alternatif pemecahannya
6. Melaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan masyarakat
7. Menjalin kegiatan kemitraan dengan unsur-unsur terkait di masyarakat untuk mendukung kegiatan di wilayah binaan
8. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dalam upaya mendukung pemecahan masalah kesehatan
9. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasar pencapaian tujuan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
10. Membuat laporan kegiatan

### **IV. WAKTU PELAKSANAAN**

Program Pembinaan Wilayah Berkelanjutan masing-masing dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diusulkan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi maksimal secara berkelanjutan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dan akan dievaluasi setiap semester sesuai dengan program maupun target yang telah ditetapkan.

## **V. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN WILAYAH BINAAN**

- 1) Langkah Persiapan ( setiap Jurusan / Prodi membentuk Panitia pelaksanaan mempersiapkan dan menyiapkan proposal sesuai pedoman pelaksanaan program Wilayah Binaan)
- 2) Langkah Penjajakan/Pengenalan Wilayah
  - a. Orientasi wilayah terhadap program dan permasalahan kesehatan (Pengumpulan data sekunder)
  - b. Pendekatan kepada para mitra
  - c. Buat diskripsi dan analisis masalah
- 3) Langkah Perencanaan Pemecahan Masalah Kesehatan
  - a. Susunlah *Plan Of Action* ( Rencana Kegiatan Pemecahan Masalah ) dari masing-masing masalah yang telah ditemukan
  - b. Menetapkan tujuan yang akan di capai
  - c. Susun program penyelesaian masalah yang akan dilaksanakan berdasarkan prioritas masalah yang telah disepakati bersama para mitra
  - d. Menetapkan waktu waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan bersama para mitra
- 4) Membuat MoU atau MoA Kerjasama dengan wilayah binaan berkelanjutan
- 5) Buatlah PROPOSAL KEGIATAN (Format Terlampir) yang berisi Kerangka Acuan Kegiatan pada program kegiatan yang meliputi :
  1. Halaman Judul (cover)
  2. Halaman pengesahan
  3. Ringkasan kegiatan (1 lembar)
  4. Analisis Situasi
  5. Rumusan Masalah
  6. Tujuan kegiatan
  7. Indikator Keberhasilan Program
  8. Rencana Program
  9. Tempat dan Jadwal Kegiatan
  10. Luaran (Output) dan Dampak (Output) / hasil kegiatan yang diharapkan
  11. Keberlanjutan Kegiatan dan Capaian Tahun Sebelumnya (Jika ada, mohon dijelaskan capaian tahun sebelumnya, tahun pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta sumber pembiayaan kegiatan sebelumnya).
  12. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## **VI. DISKRIPSI PROPOSAL**

### **A. Judul**

Judul singkat, spesifik, dan jelas memberi gambaran kegiatan yang diusulkan.

### **B. Analisis Situasi**

1. Menguraikan secara jelas gambaran, profil, dan kondisi masyarakat sasaran.
2. Menguraikan kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Mendeskripsikan hasil survei awal yang telah dilakukan, meliputi survei terhadap SDA, SDM, kelembagaan dan sumber-sumber pendanaan.
4. Menjelaskan mengenai kondisi awal masyarakat sasaran yang akan menerima kegiatan pengabdian agar diuraikan secara faktual dengan dilengkapi data-data kuantitatif dan kualitatif yang cukup (jumlah khlayak sasaran, jumlah orang yang terlibat, tokoh tokoh masyarakat yang terlibat, jangkauan wilayah kegiatan, luas lahan, volume, jumlah kegiatan, karakteristik khlayak sasaran, mitra, dll).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Merumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan mengacu pada tema-tema kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Menunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam program yang akan dilaksanakan

#### **D. Tujuan dan Target Kegiatan**

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik
2. Rumusan tujuan harus jelas, terukur dan merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah program selesai dilaksanakan.

#### **E. Indikator Keberhasilan Program**

Keberhasilan program diketahui dengan membandingkan perubahan- perubahan indikator yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Indikator- indikator tersebut adalah:

##### **a) Perubahan perilaku**

Perubahan perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap mental/kesadaran dan keterampilan). Menguraikan dengan jelas perubahan perilaku masyarakat yang akan terjadi pasca PHBD. Jelaskan pula cara untuk mengukur perubahan tersebut.

##### **b) Perubahan fisik**

Mendeskripsikan dengan jelas perubahan-perubahan fisik yang akan terjadi di masyarakat pasca kegiatan dan jelaskan cara mengukur perubahan fisik tersebut.

##### **c) Kemitraan**

Terjalannya kemitraan dengan berbagai pihak yang digambarkan dengan perencanaan kemitraan yang akan dijalin selama pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan, dilengkapi dengan peran masing-masing mitra.

##### **d) Kelembagaan**

Terbentuknya kelembagaan lokal di masyarakat yang akan meneruskan dan mengembangkan program.

##### **e) Rencana Tindak Lanjut**

Dihasilkannya rancangan program tindak lanjut

#### **F. Rencana Program**

Dituliskan rencana program kegiatan dan sub program kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan pengenalan kondisi wilayah binaan
- b) Kegiatan Survei Mawas Diri
- c) Kegiatan Musyawarah dengan Kemitraan
- d) Kegiatan Perencanaan Partisipatif
- e) Pelaksanaan Kegiatan
- f) Pembinaan Kelestarian

Rencana program dilengkapi dengan Langkah-langkah kegiatan, strategi Pembinaan, Jumlah Sasaran, Tempat dan Waktu (untuk masing-masing kegiatan), Metode, Media. (Dalam bentuk table Rencana Program dan Sub Program).

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci meliputi teknik, cara atau tahapan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan program.

#### **G. Tempat dan Jadwal Kegiatan**

Lokasi daerah sasaran ditunjukkan dengan media elektronik misalnya google map.

Jadwal kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dalam bentuk Bar-chart. Bar-chart memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.

#### **H. Keluaran dan Dampak (*output dan outcome*)**

- a. Luaran (*output*) yang akan diharapkan dari kegiatan ini agar dikemukakan secara eksplisit dengan menyertakan rencana pembuatan produk. Contoh luaran : produk inovasi, Profil

dan poster hasil pelaksanaan program, Publikasi media massa, Jejaring yang terbentuk, Produk teknologi tepat guna, Manual/panduan aplikasi teknologi produk, dll.

b. Dampak (Outcome)

Terbentuknya masyarakat di wilayah binaan yang diindikasikan dengan meningkatnya kualitas hidup dan apresiasi masyarakat terhadap dunia perguruan tinggi serta terjalinnya hubungan harmonis antara dunia perguruan tinggi dan masyarakat.

**I. Langkah Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Laksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan
- b. Buat laporan Hasil Kegiatan dengan menuliskan evaluasi hasil kegiatan

**J. Langkah Evaluasi Kegiatan**

- a. Evaluasi kegiatan merupakan penilaian perkembangan/kemajuan/keberhasilan tujuan dan indikator yang telah anda tetapkan pada Kerangka Acuan Kegiatan
- b. Buatlah Rencana Tindak Lanjut (RTL)

**K. Penyusunan Laporan**

Buatlah laporan kegiatan (format terlampir) yang meliputi:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (Analisis situasi)
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan kegiatan
- D. Manfaat Kegiatan

BAB II. RANCANGAN KEGIATAN

1. Sasaran
2. Kepanitiaan dan pelaksana kegiatan
3. Metode kegiatan
4. Tempat dan waktu
5. program kerja
6. jadwal kegiatan
7. anggaran biaya

BAB III. HASIL KEGIATAN DAN LUARAN YANG DICAPAI

Data disajikan dalam bentuk gambar dan tabel. Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan perlu mendapatkan catatan dalam bab ini serta potensi keberlanjutan

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Rencana Tindak Lanjut

Bab ini berisi uraian tentang tingkat keberhasilan program yang sudah dilaksanakan mengacu pada beberapa indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Pada bab ini berisi saran-saran konkrit untuk tindak lanjut program.

Sertakan :

- Daftar Pustaka
- Lampiran-Lampiran :
  - Log Book Kegiatan



- Form monitoring pasca program
- Surat Ijin Pelaksanaan kegiatan
- SK Tim Pembinaan Wilayah Binaan
- Surat pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Wilayah Binaan
- Denah Lokasi Wilayah Binaan
- MOA
- Rundown Acara
- Dokumentasi Acara
- dll

## **VII. Penutup**

Demikian panduan pelaksanaan wilayah binaan Poltekkes Kemenkes Malang untuk dijadikan acuan masing-masing Jurusan/Program Studi dalam mengembangkan wilayah binaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN 1 - FORMAT LAPORAN

PROGRAM PEMBINAAN WILAYAH BERKELANJUTAN

DI.....



JUDUL

Tim Pembinaan Wilayah Berkelanjutan :

PRODI/JURUSAN .....

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

JURUSAN .....

Tahun

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul :  
Bidang Pengabdian :  
Nama Ketua Tim :  
a) Nama Lengkap :  
b) Jenis Kelamin :  
c) NIDN :  
d) Disiplin :  
e) Pangkat/Golongan :  
f) Jabatan Fungsional :  
g) Jurusan/Program Studi :  
h) Alamat :  
i) Telp/Alamat E-Mail :  
j) Alamat Rumah :  
Lokasi Kegiatan :  
a) Lokasi Kegiatan Mitra :  
Wilayah :  
b) Kabupaten/Propinsi :  
Jumlah Dana Yang Diusulkan :

Kepala Pusat  
Penelitian dan Pengabmas

(nama dan gelar)  
NIP:

Kota, tanggal/bulan/tahun  
Ketua Tim

(nama dan gelar)  
NIP:

Mengetahui,  
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

(nama dan gelar)  
NIP:

## IDENTITAS LAPORAN

- a. Judul : \_\_\_\_\_
- b. Jenis Kegiatan : Baru/Lanjutan
- c. 2.1 Ketua Tim : \_\_\_\_\_
  - i. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
  - ii. Jabatan Fungsional/Golongan : \_\_\_\_\_
  - iii. NIP : \_\_\_\_\_
  - iv. Jurusan : \_\_\_\_\_
  - v. Kelompok Keilmuan : \_\_\_\_\_
  - vi. Alamat Kantor/Telp/Fax/E-mail : \_\_\_\_\_

### 2.2 Dosen :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keilmuan	Unit Kerja/Lembaga	Diskripsi Tugas dalam Tim
1.				
2.				

### 2.3 Tenaga Kependidikan / Mahasiswa:

No	Nama dan Gelar Akademik	Unit Kerja/Lembaga	Diskripsi Tugas dalam Tim
1.			
2.			

4. Biaya yang diusulkan : Rp. ....

5. Lokasi Kegiatan : .....

6. Keluaran (*Output*) :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

7. Dampak (*Outcome*) :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

8. Jenis Kegiatan (Pilih yang sesuai) :
- a. Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat;
  - b. Penerapan Karya Seni/Desain/Arsitektur/Perencanaan Wilayah untuk Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Penerapan Karya Tulis Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. Pelaksanaan Kegiatan kepedulian sosial berupa pendidikan, pendampingan dan penyuluhan;
  - e. Perintisan kelompok usaha dan pengembangan UKM;
  - f. Penanganan Darurat Bencana.

Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat  
Poltekkes Kemenkes Malang

Malang, .....

Ketua Tim Pelaksana

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
NIP. ....

Mengetahui

Direktur Poltekkes Kemenkes Malang

(.....)  
NIP. ....